

KUMPULAN ABSTRAK E-BOOK

KOLEKSI E-DEPOSIT

PERPUSTAKAAN

NASIONAL

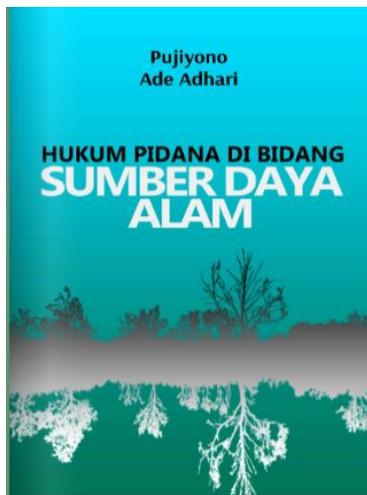
TEMA HUKUM (3)
2020



PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Penyusun: Lestari Endah Pratiwi
Penyunting: Agus Wahyudi

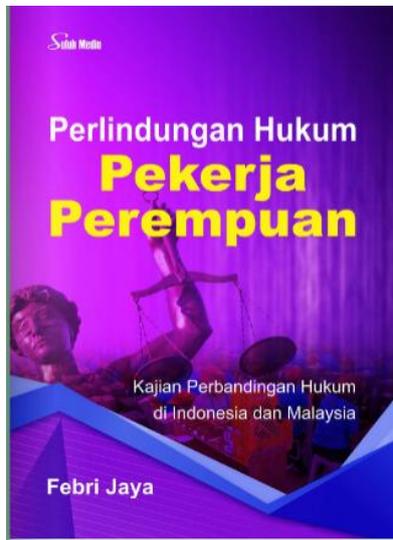
Judul : Hukum Pidana di Bidang Sumber Daya Alam
Penerbit : Deepublish
Tahun : 2019
Penulis : Pujiyono, Ade Adhari
Sumber : Pelaksanaan UU No. 13 Tahun 2018 (DEP2002001103)



Penggunaan sanksi pidana dalam praktik legislatif saat ini menunjukkan adanya peningkatan. Pidana saat ini dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Interaksi norma hukum pidana dengan norma dalam berbagai lapangan bidang hukum semakin masif. Intensitas hubungan norma hukum pidana dengan norma hukum administratif dapat terlihat dengan adanya Bab Ketentuan Pidana dalam berbagai undang-undang. Keberadaan ketentuan pidana dalam UU Ketenagalistrikan, UU Migas, UU Perikanan dan UU Minerba menarik dan layak untuk mendapat perhatian serius. Hal tersebut dikarenakan fungsi norma hukum pidana dalam undang-undang yang masuk dalam kelompok undang-undang di bidang SDA berfungsi untuk melindungi kepentingan bangsa dan negara atas sumber daya alam dari berbagai perbuatan yang mengancam keberlanjutan dan kelestarian pengelolaan SDA demi mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, mendorong agar setiap orang menghormati dan menaati norma hukum administratif yang mengatur pengelolaan dan pemanfaatan SDA dan untuk mencegah terjadinya tindak pidana di bidang di bidang SDA melalui penegakan hukum yang tegas sehingga menimbulkan pengaruh mendidik. Kajian yang dimuat dalam tulisan ini mengungkapkan bagaimana pengaturan kebijakan hukum pidana dalam UU Ketenagalistrikan, UU Migas, UU Perikanan dan UU Minerba saat ini, dan dilengkapi dengan analisis terhadap kelemahan kebijakan formulasinya sehingga dapat dijadikan sebagai masukan pembaharuan ketentuan pidana undang-undang tersebut di masa depan.

Kata kunci : *hukum pidana, sumber daya alam, UU ketenagalistrikan, UU migas, UU minerba, UU perikanan*

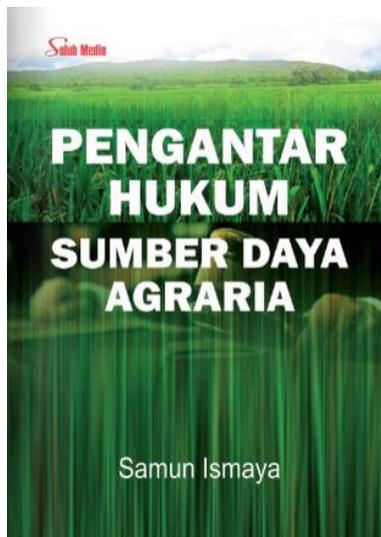
Judul : Perlindungan Hukum Pekerja Perempuan: Kajian Perbandingan Hukum di Indonesia dan Malaysia
Penerbit : Suluh Media
Tahun : 2019
Penulis : Febri Jaya
Sumber : Pelaksanaan UU No. 13 Tahun 2018 (DEP2002001077)



Penulisan terkait dengan tema buku ini dilatarbelakangi fenomena disparitas perlakuan antara pekerja perempuan dan pekerja laki-laki, meskipun pengakuan HAM secara yuridis telah diakui negara. Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan merupakan bagian dari penegakan HAM. Guna menjamin penegakan HAM tersebut, isu yang menjadi fenomena hukum adalah adanya pemberi kerja yang melakukan diskriminasi dan tidak memperhatikan hak pekerja perempuan. Dalam buku ini, diberikan pemaparan mengenai perlindungan hukum pekerja perempuan dari aspek hukum nasional Indonesia dengan studi kajian perbandingan dengan hukum di negara Malaysia mengenai tema yang sama serta hukum internasional berupa berbagai konvensi internasional terkait dengan perlindungan pekerja perempuan. Indonesia dan Malaysia merupakan negara yang menghormati hak asasi perempuan. Indonesia dan Malaysia sama-sama menjamin perlindungan hukum bagi pekerja perempuan masing-masing negara. Di dalam buku ini penulis juga berupaya untuk menentukan hukum negara mana yang lebih memberikan perlindungan hukum bagi pekerja perempuan di Indonesia dan Malaysia. Buku ini tidak hanya berisikan paparan secara akademik yang berlandaskan teori-teori hukum namun juga paparan secara praktis yang mudah dipahami oleh pembaca. sehingga buku sangat tepat untuk dijadikan referensi bacaan oleh mahasiswa maupun masyarakat umum.

Kata kunci : *perlindungan hukum, pekerja perempuan, penegakan HAM, Indonesia, Malaysia*

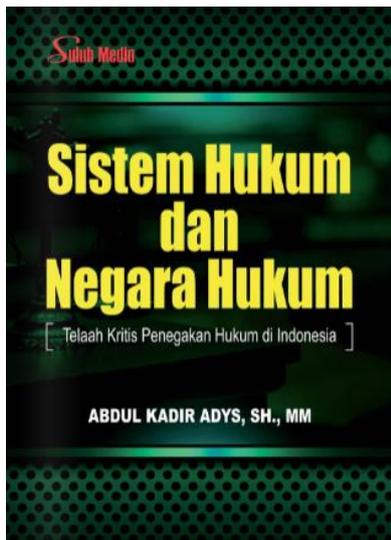
Judul : Pengantar Hukum Sumber Daya Agraria
Penerbit : Suluh Media
Tahun : 2019
Penulis : Samun Ismaya
Sumber : Pelaksanaan UU No. 13 Tahun 2018 (DEP2002000992)



Buku ini berisi kajian hukum tentang hal yang berkenaan dengan pengelolaan sumber daya agraria di Indonesia dalam aspek hukum keperdataan maupun dari aspek hukum publik. Buku ini juga mengkaji dari aspek teori, regulasi maupun implementasi sebagai dasar bagi pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Aspek regulasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya agraria menjadi aspek penting sebagai dasar berpijak bagi negara untuk mempergunakan sumber daya agraria secara bijaksana, termasuk memberikan akses kepada masyarakat untuk ikut serta berperan secara aktif dalam mewujudkan sumber daya agraria sebagai sarana pembangunan nasional. Aspek regulasi ini selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu dengan asumsi dasar bahwa ada perubahan-perubahan atas konsep dasar maupun implementasi pengelolaan sumber daya agraria di masa yang akan datang. Materi dari buku ini disamping diambil dari berbagai literasi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya agraria juga disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini disamping memperhatikan juga dengan perkembangan Hukum Sumber Daya Agraria di masa kini. Secara terperinci Buku Pengantar Hukum Sumber Daya Agraria berisi tentang Dasar Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Agraria Indonesia; Prinsip-Prinsip Pengelolaan Sumber Daya Agraria; Prinsip-Prinsip Pengelolaan Tanah; Prinsip-Prinsip Pengelolaan Sumber Daya Air; Prinsip-Prinsip Pengelolaan Sumber Daya Minerba; Prinsip-Prinsip Pengelolaan Sumber Daya Hutan; dan Pengaturan Pertanahan di Indonesia.

Kata kunci : *hukum, sumber daya agraria, pengelolaan tanah, minerba, sumber daya hutan*

Judul : Sistem Hukum dan Negara Hukum: Telaah Kritis Penegakan Hukum di Indonesia
Penerbit : Suluh Media
Tahun : 2019
Penulis : Abdul Kadir Adys
Sumber : Pelaksanaan UU No. 13 Tahun 2018 (DEP2002000980)



Pembahasan Sistem Hukum dan Negara Hukum diawali dengan uraian tentang sistem kehidupan sosial, yang menjadi wadah berlakunya sistem hukum. Dalam sistem kehidupan sosial manusia disebut sebagai “*zoon politiqon*” yang harus selalu melakukan perhubungan hukum dengan sesamanya yang dapat bersinergi atau sebaliknya dapat pula berlawanan, karena itu diperlukan suatu tatanan untuk mewujudkan kehidupan yang adil dan damai. Tatanan itu yang disebut sistem hukum yang komponennya terdiri dari substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum yang dalam buku ini dibahas secara kritis dan komprehensif. Pembahasan substansi hukum akan mengantarkan pembaca untuk mengetahui dan memahami berbagai tata hukum yang berlaku, sedangkan pada pembahasan struktur hukum akan dikemukakan berbagai struktur hukum dan organ penegak hukum sedangkan pada kultur hukum dipaparkan bagaimana *performance* budaya atau perilaku masyarakat yang berimplikasi hukum. Sedangkan pada konsepsi negara hukum dibahas secara mendalam tentang ciri-ciri negara hukum yang meliputi asas legalitas, pemerintahan yang demokratis, pengakuan terhadap hak asasi manusia, pemencaran kekuasaan negara, kekuasaan kehakiman yang merdeka dan adanya peradilan administrasi negara. Semua pembahasan ini akan mengantarkan pembaca pada pengetahuan yang mendalam dan totalitas tentang korelasi antara sistem kehidupan sosial, sistem hukum dan sistem negara hukum.

Kata kunci : *sistem hukum, negara hukum, substansi hukum, kultur hukum*

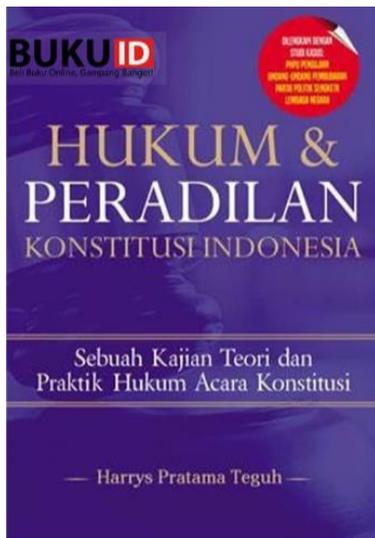
Judul : Hukum dan Peradilan Konstitusi Indonesia: Sebuah Kajian Teori dan Praktek Hukum Acara Konstitusi

Penerbit : Pustaka Referensi

Tahun : 2019

Penulis : Harrys Pratama Teguh

Sumber : Pelaksanaan UU No. 13 Tahun 2018 (DEP2001000886)



Buku ini dimaksudkan untuk merespon perkembangan peradilan konstitusi yang dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi yang di satu sisi telah memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan hukum dan ketatanegaraan Indonesia, dan di sisi lain telah memunculkan studi baru yang perlu dikaji dan diajarkan di perguruan tinggi yaitu Hukum Berita Acara Peradilan Konstitusi di Indonesia. Dengan semakin meluasnya studi tentang Hukum Berita Acara Peradilan Konstitusi di Indonesia diharapkan dapat mendorong penyebarluasan dan peningkatan pemahaman peradilan konstitusi yang dijalankan oleh MK sehingga dalam jangka panjang akan memperlancar proses persidangan di MK dan pada akhirnya ikut mewujudkan visi membangun konstitusionalitas Indonesia dan mewujudkan budaya sadar berkonstitusi. Penyusunan buku ini mengacu pada Hukum Acara MK sebagaimana diatur dalam UU MK dan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK), serta diperkaya dari perspektif teoritis, komparasi, dan praktik. Di dalamnya tidak hanya berisi uraian normatif, tetapi didahului dengan penjelasan teoritis yang diikuti dengan pendalaman komparatif. Dalam penggambaran hukum acara juga diuraikan perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam praktik peradilan di MK, disertai dengan rujukan kepada putusan-putusan MK yang telah ada dan menjadi dasar dari praktik Hukum Acara MK.

Kata kunci : *peradilan konstitusi, Mahkamah Konstitusi, hukum acara Mahkamah Konstitusi,*